



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**UNIT KERJA** : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AHMADI
2. Jabatan : KEPALA PELAKSANA
3. NHK : 105965

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 5.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 9700 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, WARISAN Rp. 970.000.000
3. Tanah Seluas 7000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/260 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
5. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 8.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 15.020.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 3.500.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.476.520.000

**III. HUTANG**

Rp. 116.780.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 5.359.740.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.